

The Scout Movement and Indonesian National Identity: A Critical Reflection

Pramuka dan Identitas Nasional Indonesia: Sebuah Refleksi Kritis

Haflah Leste Distincta^{1*}

¹Universitas Pertahanan RI

¹ Haflahd@gmail.com

INFORMATION

Article history:

Received April 7, 2025

Accepted July 19, 2025

Keywords:

National Identity,

Nationalism,

Scout Movement,

Patriotism,

Indonesia Scout (Pramuka)

***Corresponding Author:**

Haflah Leste Distincta

Universitas Pertahanan RI

Email: haflahd@gmail.com

ABSTRACT

The development of the Scout Movement in Indonesia, which originated from the early scouting movement, cannot be separated from the government policies during the Soekarno era—namely the Political Manifesto, the 1945 Constitution, Indonesian Socialism, Guided Democracy, and the Indonesian Personality—collectively known as Manipol Usdek. This was Soekarno's grand vision of creating a just and prosperous Indonesia rooted in the noble values of Pancasila. The scouting movement has long contributed to strengthening Indonesia's national identity and promoting national integration. Therefore, contemporary government policies should ideally support the institutionalization of nationalism through today's Scout Movement. This study employs a qualitative approach using a literature review method.

PENDAHULUAN

Awal perkembangan gerakan Pramuka yang berawal dari gerakan kepanduan di Indonesia tidak lepas dari kebijakan pemerintah era Soekarno yaitu Manifesto Politik, UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia atau biasa disingkat Manipol Usdek sebuah gagasan besar Soekarno dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur dengan kepribadian yang berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila (Kompas 2021).

Kepanduan sendiri pertama kali muncul dari seorang Letnan Jenderal Angkatan Darat Inggris, Lord Robert Baden-Powell, yang menerbitkan buku berjudul *Scouting for Boys* yang terdiri dari enam jilid pada tahun 1908 (Katamsi, 2001), setelah mengikuti sebuah perkemahan di Pulau Brownsea bersama para pemuda di tahun sebelumnya. Buku tersebut kemudian menjadi pedoman bagi gerakan kepanduan yang terus berkembang di seluruh dunia, dengan tujuan utama untuk mendidik dan membimbing generasi muda, baik laki-laki maupun perempuan, agar menjadi individu yang berpengaruh dan berkontribusi bagi masyarakat.

Di Indonesia, kepanduan ada sejak masa kolonial Belanda dan dikenal melalui sebuah organisasi kepanduan bernama Nederlandsche Padvinder Organisatie, yang didirikan oleh P. J. Smits dan Mayor De Yoger. Organisasi ini hadir pertama kali pada tahun 1912 dan dikhususkan untuk para pemuda Belanda. Dua tahun setelahnya, organisasi ini berkembang dan berganti nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging (NIVP) atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda pada tahun 1914 (Suhatno 2001). Pada tahun yang sama, Mangkunegara VII kemudian membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javaansche Padvinder Organisatie (JPO).

Lahirnya JPO kemudian memicu gerakan nasional lainnya untuk membentuk organisasi kepanduan serupa yang berasaskan nasionalis maupun agama, seperti Hizbul Wathan, Jong Java Padvinderij (JJP), Sarekat Islam Afdeling Padvinderij, Pandoe Pemoeda Sumatra (PPS), Indonesisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO), dan Pandoe Kebangsaan. Semua organisasi ini akhirnya melebur menjadi berbagai organisasi kepanduan nasional seperti Kependoean Bangsa Indonesia (KBI), Nationale Padvinderij (NP), Nationaal Indonesische Padvinderij (NATIPIJ), Pandu Indonesia, Padvinders Organisatie Pasundan, Pandu Kesultanan, El-Hilaal, Pandu Ansor, Al Wathoni, Tri Darma (Kristen), Kependuan Asas Katolik Indonesia (KAKI), dan Kependuan Masehi Indonesia,

serta masih banyak lagi. Semua organisasi di atas ini berada di bawah naungan organisasi induk bernama Nationale Padvinders Organisatie (NPO) yang dipimpin oleh Soerjoadidarmo (Andrik Suprianto 2011).

Pada tahun 1941, Perkemahan Kebangsaan Indonesia Oemoem (PERKINO) pertama kali diadakan di Yogyakarta dengan Dr. Martohoehsodo sebagai ketua penyelenggara, dan diikuti oleh berbagai organisasi pandu tersebut (Amarso Katamsi et al. 2001). Pemerintahan Hindia Belanda kemudian diambil alih oleh Jepang pada Maret 1942, dan seluruh organisasi politik termasuk gerakan kepanduan dilarang. Oleh Jepang, gerakan kepanduan dibekukan dan diganti dengan gerakan semi militer seperti Seinendan dan Keiboden, sesuai dengan model pelatihan Jepang. Namun, jiwa kepanduan tidak serta-merta redup, tetapi terus hidup dalam masyarakat. Pada Februari 1943, para pandu yang telah dibubarkan tadi berhasil mengadakan PERKINO II di Jakarta, yang menunjukkan besarnya rasa cinta masyarakat terhadap gerakan kepanduan (Rizky 2018).

Pasca kemerdekaan, kegiatan kepanduan terus berjalan, ditandai dengan kelahiran Pandu Rakyat Indonesia (PRIN) berdasarkan hasil kongres pada 28 Desember 1945. Seiring dinamika politik dan sosial, muncullah berbagai organisasi kepanduan baru, yang menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mendidik dan membina generasi muda. Namun, keragaman ini juga membawa tantangan dalam mencapai kesatuan dan koordinasi pada masa itu (Suharto 2005).

Di sisi lain, Soekarno menginginkan adanya perubahan dalam gerakan kepanduan agar dapat terlepas dari Baden Powellisme yang dianggap sebagai produk imperialisme, kapitalisme, dan kolonialisme. Di bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX, para pandu dari berbagai organisasi kepanduan mulai dikumpulkan, dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Ir. Djuanda dan Menteri PP dan K (Prof. Prijono). Dalam pertemuan tersebut, Ir. Djuanda mengusulkan agar organisasi kepanduan dipersatukan dan disempurnakan sesuai dengan UUD 1945 (Ramdhani 2014).

Tahun 1950, Ikrar Kepanduan Indonesia pertama kali terbentuk. Keinginan Soekarno semakin kuat untuk membubarkan semua gerakan kepanduan dan meleburkannya ke dalam satu kepanduan nasional bernama Praja Muda Karana (Pramuka). Setelah melalui proses panjang, pada tanggal 14 Agustus 1961 melalui Keputusan Presiden No. 447/1961, Soekarno secara resmi mengesahkan Gerakan Pramuka sebagai gerakan kepanduan nasional di Indonesia (Amarso Katamsi et al. 2001). Nama Pandu Rakyat tetap digunakan dalam Pramuka sebagai bentuk penghormatan terhadap PRIN yang berdiri lebih dahulu (Suharto 2001).

Berbicara tentang gerakan Pramuka masa kini, pada awal April 2024 tersiar berita mengenai kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa kegiatan Pramuka tidak lagi bersifat wajib bagi seluruh peserta didik (Tirto 2024). Kebijakan ini menimbulkan kontroversi dan penyesalan di kalangan masyarakat, mengingat bahwa Pramuka selama ini memainkan peranan penting dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia. Pramuka merupakan sarana pendidikan nonformal yang berorientasi pada pembentukan nilai kepemimpinan, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial (De Gani dan Sembiring 2023).

Sebagaimana diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja (1977), pembangunan karakter bangsa yang berakar pada nilai-nilai Pancasila merupakan dasar penting bagi keberlangsungan negara. Oleh sebab itu, penghapusan kewajiban kegiatan Pramuka dianggap bertentangan dengan semangat kebangsaan dan upaya membentuk warga negara yang berjiwa nasionalis dan berintegritas. Dalam konteks pendidikan karakter, kegiatan Pramuka berfungsi sebagai wahana internalisasi nilai-nilai Pancasila yang diwujudkan melalui aktivitas sosial, pelatihan kepemimpinan, dan pembinaan rasa cinta tanah air (Utomo 2014).

Gerakan Pramuka memiliki peran penting dalam membangun identitas nasional Indonesia. Melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan kepemimpinan, pengabdian masyarakat, dan pembinaan moral, Pramuka menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila serta wawasan kebangsaan kepada generasi muda (Anderson 1983). Nilai-nilai ini menjadi elemen utama dalam menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan memperkuat identitas bangsa di tengah tantangan globalisasi (Castells 1996).

Selain itu, kegiatan Pramuka juga mengajarkan pentingnya disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama, yang merupakan aspek fundamental dalam membangun kesadaran kolektif bangsa. Sebagaimana dinyatakan oleh Ernest Renan (1882), semangat kebangsaan lahir dari “plebiscite de tous les jours” — yaitu kesepakatan bersama setiap hari untuk menjadi satu bangsa. Pramuka menjadi salah satu arena tempat nilai kebangsaan tersebut diperlakukan dalam kehidupan nyata, khususnya di kalangan generasi muda (Renan 1882).

Di sisi lain, Rousseau (1762) dalam *The Social Contract* menegaskan bahwa terbentuknya tatanan sosial yang baik hanya mungkin jika warganya memiliki rasa kepemilikan terhadap negara dan bangsa. Gerakan Pramuka mewujudkan hal ini melalui kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan kesadaran moral, gotong royong, dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian, Pramuka tidak hanya sekadar kegiatan ekstrakurikuler, melainkan juga bagian dari proses institusionalisasi nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Budiardjo 2008; Suharto 2005). Melalui aktivitas Pramuka, peserta didik diarahkan untuk memiliki semangat kebangsaan yang kuat, menjunjung tinggi persatuan, serta berkontribusi aktif terhadap pembangunan nasional.

Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba menganalisis proses pembentukan identitas nasional bangsa melalui mekanisme institusionalisasi nilai kebangsaan dan nasionalisme di tanah air, yang diwujudkan melalui implementasi kebijakan Gerakan Pramuka di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan refleksi kritis

terhadap posisi Pramuka sebagai instrumen sosial yang berperan strategis dalam memperkuat identitas nasional dan integrasi bangsa Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis kebijakan dan studi pustaka dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber referensi akademik, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen resmi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial secara kontekstual dan interpretatif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2007), bahwa penelitian kualitatif berfungsi untuk memahami makna di balik tindakan sosial melalui deskripsi sistematis terhadap data yang diperoleh.

Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, meliputi literatur tentang gerakan kepanduan, nasionalisme, pendidikan karakter, serta identitas nasional. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan menganalisis isi dari sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian ini (Creswell 2017; Yin 2016).

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan, mengategorikan, dan menafsirkan informasi yang ditemukan dalam berbagai sumber pustaka. Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan mengenai peran Gerakan Pramuka dalam membentuk identitas nasional dan mewujudkan integrasi bangsa (Bungin 2003).

Pendekatan kajian pustaka (library research) dipilih karena penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer seperti observasi atau wawancara lapangan. Kajian pustaka memungkinkan peneliti memperoleh wawasan yang lebih luas dan mendalam mengenai peran sosial, budaya, dan pendidikan dari Gerakan Pramuka di Indonesia (Creswell 2009).

Pemilihan sumber pustaka dilakukan secara selektif dan kritis, dengan mengutamakan referensi yang kredibel dan relevan. Hanya karya akademik dan dokumen institusional yang terverifikasi dari lembaga resmi seperti Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, serta jurnal dan buku akademik yang dijadikan rujukan (Kwartir Nasional 2024; Tirto 2024; Kompas 2021).

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan reflektif mengenai bagaimana kebijakan serta aktivitas Gerakan Pramuka berkontribusi terhadap pembentukan identitas nasional dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara dan bangsa adalah dua entitas yang berbeda namun sangat erat kaitannya satu sama lain. Definisi dari negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat pada suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (MacIver 1926). Sementara bangsa adalah sekelompok manusia yang dipersatukan oleh kesamaan kehendak dan tujuan bersama. Dapat dipahami bahwa negara merupakan alat politik bagi bangsa untuk mencapai tujuan kolektif tersebut. Bangsa merupakan dasar bagi terbentuknya suatu negara; tanpa bangsa, maka sebuah negara tidak akan pernah ada (Budiardjo 2008).

Bangsa sering kali disebut juga dengan kata *nation*. Meskipun secara etimologi terdapat sedikit perbedaan di antara keduanya, namun pada dasarnya bangsa atau *nation* merupakan sebuah komunitas politik yang terbayang dalam kehidupan bernegara dengan kesamaan bahasa, budaya, sejarah, dan identitas bersama (Anderson 1983). Penting untuk menyinggung kata *nation* di sini, karena kata ini menjadi padanan dasar bagi kata *nasional* dan *nasionalisme*.

Berbicara tentang negara dan bangsa, konsep nasionalisme tidak bisa dipisahkan dari keduanya. Seorang filsuf Prancis, Ernest Renan, mendefinisikan nasionalisme sebagai kesadaran bersama yang tercipta dari seperangkat pengalaman sejarah, bahasa, budaya, serta aspirasi yang sama (Renan 1882). Renan beranggapan bahwa sebuah bangsa bukanlah sesuatu yang alami, melainkan sebuah konstruksi historis melalui penderitaan atau kejayaan bersama yang akhirnya menciptakan ikatan kuat. Tidak hanya itu, penting dan krusial untuk dilihat dari proses tersebut adalah apa yang disebut Renan dengan adanya *daily plebiscite* artinya setiap hari, dengan jiwa dan perasaan penuh, masyarakat melalui kehendak bebasnya bersepakat menjadi bagian dari sebuah bangsa. Kesadaran moral atas atas kesukarelaan inilah yang menjadi dasar utama terbentuknya nasionalisme.

Identitas Nasional Indonesia

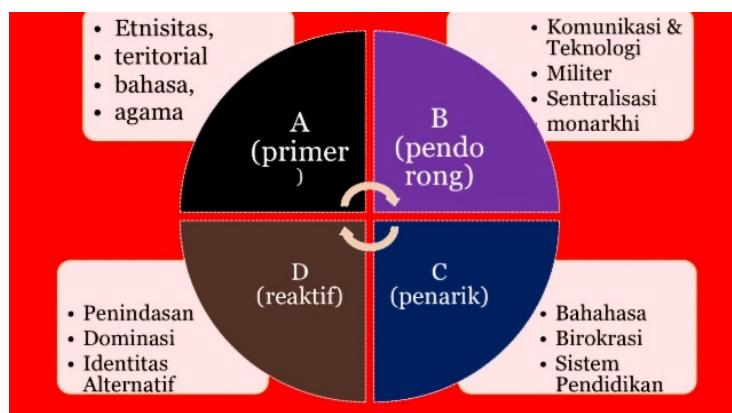
Kesamaan identitas menjadi kunci agar sebuah bangsa dapat terbentuk dan tetap eksis. Istilah identitas nasional (*national identity*) berasal dari dua padanan kata, identitas dan nasional. Identitas adalah suatu kategori sosial yang diidentifikasi oleh individu, yang memberikan mereka rasa kebersamaan dan membedakan mereka dari kategori lain (Tajfel and Turner 1986). Dengan kata lain, identitas merupakan ciri-ciri atau keadaan khas yang menjadi tanda jati diri, sementara *nasional* berarti bersifat kebangsaan. Maka, identitas nasional ialah suatu jati diri bangsa yang dimiliki oleh suatu bangsa yang berisikan nilai-nilai budaya, sejarah, cita-cita yang melekat pada bangsa tersebut (Mochtar Kusumaatmadja, 1977), yang nantinya dapat menjadi pedoman bagi setiap individu yang tergabung dalam kelompok masyarakat bangsa tertentu.

Robert De Ventos, seorang sosiolog dan antropolog Prancis, mengemukakan teori tentang pembentukan identitas nasional yang dipublikasikan oleh Manuel Castells dalam bukunya *The Power of Identity* (Castells 1996). Teori

ini menjelaskan bahwa identitas nasional suatu bangsa muncul sebagai hasil dari interaksi historis antara empat faktor penting, yaitu: (1) faktor primer yang sifatnya fundamental seperti sejarah, bahasa, wilayah, kebudayaan; (2) faktor pendorong yang berasal dari eksternal seperti penjajahan, globalisasi, dan perkembangan teknologi; (3) faktor penarik yang sifatnya internal seperti kepemimpinan, ideologi, simbol nasional, cita-cita nasional; dan (4) faktor reaktif terhadap pengaruh luar.

Pada konteks ke-Indonesiaan, identitas nasional bangsa Indonesia adalah identitas yang bersumber dari nilai luhur Pancasila, yang aktualisasinya tercermin dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Identitas tersebut menunjuk pada lambang, simbol atau identitas yang bersifat nasional seperti bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, Garuda Pancasila, dan slogan Bhineka Tunggal Ika.

Guna menjaga identitas nasional, maka rasa cinta tanah air atau nasionalisme dan integrasi nasional menjadi satu hal yang penting. Tanpa nasionalisme yang kuat, sulit untuk membangun identitas nasional yang kokoh. Sebaliknya, identitas nasional memperkuat nasionalisme dengan memberikan rasa persatuan dan tujuan bersama sebagai bangsa sehingga dapat terwujudnya integrasi dalam masyarakat tadi. Ketiga hal ini, ada dalam sebuah sistem politik yang bekerja untuk saling menguatkan satu sama lain.



Identitas nasional Indonesia merupakan hasil dari nilai-nilai budaya yang berkembang dari beragam suku menjadi kebudayaan nasional, yang diarahkan oleh Pancasila dan semangat "Bhineka Tunggal Ika". Identitas ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hukum, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai etik yang akhirnya membentuk suatu sistem pengetahuan yang lebih kita kenal dengan Wawasan Nusantara. Nilai-nilai budaya dalam identitas nasional bersifat terbuka dan terus berkembang sesuai dengan hasrat masyarakat untuk kemajuan. Hal ini menunjukkan bahwa identitas nasional terus beradaptasi agar tetap relevan dalam kondisi masyarakat yang berkembang.

Dalam konteks integrasi nasional, identitas bangsa menjadi alat untuk mempersatukan dan mengatasi perbedaan yang ada di Indonesia. Identitas nasional menjadi landasan yang kuat untuk membangun kesadaran kolektif, solidaritas, dan rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Dengan memahami dan menghargai identitas nasional, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup dalam harmoni, saling menghormati, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama, seperti yang tertuang pada alinea keempat pembukaan UUD 1945.

“...yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”

Di sisi lain, Integrasi nasional merupakan isu penting yang dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, yang memiliki keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Konsep integrasi nasional muncul sebagai upaya untuk mencapai persatuan dan kesatuan di dalam suatu negara dengan mengurangi perbedaan dan meningkatkan kesamaan antara berbagai kelompok yang ada di dalamnya. Integrasi nasional memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional merupakan upaya untuk menciptakan persatuan dan kesatuan di antara beragam suku, budaya, agama, dan bahasa yang ada di negara ini. Integrasi nasional didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila sebagai ideologi negara, dengan lima sila yang menjadi pijakan utama. Upaya integrasi nasional di Indonesia melibatkan pendidikan, kebijakan politik, pemerintahan, dan pembangunan ekonomi yang merata di seluruh wilayah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi integrasi nasional di Indonesia meliputi keragaman etnis, budaya, dan agama, kesenjangan ekonomi, politik identitas, pendidikan dan kesadaran kebangsaan, keberadaan konflik sosial dan separatisme, kebijakan pemerintah, serta peran media dan komunikasi. Faktor-faktor ini saling terkait dan kompleks, dan diperlukan upaya yang terus-menerus untuk mengelola mereka dengan baik.

Meskipun Indonesia memiliki keberagaman budaya yang kaya, integrasi nasional dan identitas nasional masih menjadi tantangan. Kesenjangan sosial dan ekonomi, konflik horizontal, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya toleransi dan kebersamaan sebagai warga negara Indonesia merupakan beberapa permasalahan yang perlu ditangani. Pemerintah memiliki peran penting dalam membangun integrasi nasional dan memperkuat identitas nasional melalui kebijakan yang inklusif, pendidikan yang mempromosikan pemahaman bersama, dan peningkatan partisipasi politik semua kelompok. Tentunya bukan kebijakan yang dihasilkan oleh Kemendikbud yang menghapuskan kewajiban pramuka, sebagai institusi yang jelas berkontribusi mencegah disintegrasi hari ini.

Dalam konteks globalisasi yang semakin terhubung dan kompleks, integrasi nasional menjadi isu yang semakin mendesak untuk dipahami dan ditangani dengan serius. Melalui pemahaman yang mendalam tentang pentingnya integrasi nasional, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasi dalam konteks sosial dan politik, diharapkan dapat tercapai integrasi nasional yang berhasil dan berkelanjutan, memelihara stabilitas sosial, mempromosikan kesetaraan, dan membangun identitas nasional yang kuat.

Gerakan Pramuka sebagai Penguatan Identitas Nasional dan Mewujudkan Integrasi Bangsa

Gerakan kepanduan, seperti halnya Pramuka di Indonesia, mempunyai peranan penting dalam memperkuat jati diri bangsa dan mewujudkan integrasi nasional. Gerakan-gerakan ini memberikan wadah bagi individu muda untuk berkumpul dan menumbuhkan rasa persatuan, patriotisme, dan rasa memiliki terhadap negaranya.

Pertama, gerakan kepanduan menekankan pentingnya nilai-nilai dan tradisi nasional. Melalui berbagai kegiatan dan program, pramuka didorong untuk mempelajari dan mengapresiasi sejarah, budaya, dan warisan bangsanya. Misalnya, pramuka di Indonesia mungkin terlibat dalam kegiatan yang menyoroti pentingnya hari libur nasional, adat istiadat, dan kesenian tradisional. Dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan tersebut, pramuka mengembangkan hubungan yang mendalam dengan negaranya dan rasa bangga terhadap identitas nasionalnya.

Kedua, gerakan kepanduan di Indonesia mendorong inklusivitas dan persatuan di antara berbagai kelompok individu. Pramuka berasal dari berbagai latar belakang, mewakili suku, agama, dan kelas sosial yang berbeda. Meski terdapat perbedaan, gerakan kepanduan mengajarkan nilai-nilai saling menghormati, toleransi, dan pengertian. Dengan bekerja sama mencapai tujuan bersama dan terlibat dalam kegiatan kolaboratif, pramuka mengembangkan persahabatan dan ikatan yang melampaui perpecahan masyarakat. Hal ini mendorong integrasi nasional dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap keseluruhan yang lebih besar.

Lebih lanjut, gerakan kepanduan memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkontribusi aktif terhadap masyarakat dan bangsanya. Melalui inisiatif pengabdian masyarakat, proyek pelestarian lingkungan, dan program pengembangan kepemimpinan, pramuka di Indonesia mempelajari pentingnya tanggung jawab sosial dan keterlibatan masyarakat. Dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi bangsanya, pramuka mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap negaranya, sehingga lagi dan lagi semakin memperkuat identitas nasionalnya.

KESIMPULAN

Gerakan kepanduan di Indonesia berperan penting dalam memperkuat jati diri bangsa dan mewujudkan integrasi nasional, baik di masa kolonial, pasca kemerdekaan, bahkan sampai hari ini. Melalui promosi nilai-nilai dan tradisi nasional, memupuk inklusivitas dan persatuan, dan mendorong partisipasi aktif dalam proyek pembangunan masyarakat dan bangsa, gerakan kepanduan menciptakan rasa bangga, memiliki, dan tujuan bersama di kalangan individu muda.

Kegiatan pramuka sebagai bagian dari gerakan kepanduan merupakan proses institusionalisasi yang tersebar dalam rangka penguatan negara melalui pembentukan identitas dan penanaman rasa nasionalisme. sehingga sudah semestinya kegiatan ini didukung penuh oleh kebijakan pemerintahan yang mumpuni, bukan malah diampatasi. harapannya, dengan terciptanya bangsa Indonesia yang berkarakter sesuai jati diri sesungguhnya dan rasa cinta tanah air akan menjadi pendukung dalam pelaksanaan fungsi-fungsi negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang pada hakikatnya kembali, menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. *Bonum publicum, common good, common wealth.*

REFERENSI

- Amarso Katamsi, et al. 2001. *40 Tahun Gerakan Pramuka*. Jakarta: Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- Anderson, Benedict. 1983. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. London: Verso.
- Andrik Suprianto. 2011. "Peranan Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) dalam Perkembahan Kepandoean Indonesia Oemoem (PERKINO) Tahun 1941." Artikel, Universitas Negeri Malang.
- ANRI. n.d. No. 34, *Kwarnas Gerakan Pramuka 1961–1974*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Castells, Manuel. 1996. *The Power of Identity*. Malden, MA: Blackwell Publishers.
- Creswell, John W. 2017. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- De Gani, Firdaus, and Muammar Sembiring. 2023. "Mengenal Identitas dan Integrasi Nasional Indonesia." *Indigenous Knowledge* 1(2):Desember.

- Ernest Renan. 1882. *Qu'est-ce qu'une Nation?* (Apakah Bangsa Itu?). Terjemahan oleh Prof. Mr. Mochtar Kusumaatmadja.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2024. "Pembangunan." *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Kompas.com. 2021. "Manipol USDEK: Latar Belakang dan Isinya." *Kompas.com*. Diakses 26 April 2024 (<https://www.kompas.com/stori/read/2021/11/08/110000979/manipol-usdek-latar-belakang-dan-isinya?page=all>).
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1977. *Pancasila dan Pembangunan*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. 2024. "Kepanduan Indonesia." *Pramuka.or.id*. Diakses 27 April 2024 (<https://pramuka.or.id/kepanduan-indonesia/>).
- Lexy J. Moleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- MacIver, R. M. 1926. *The Modern State*. London: Oxford University Press.
- Museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id. 2020. "Sejarah Pramuka Indonesia." Diakses 27 April 2024 (<https://museumsumpahpemuda.kemdikbud.go.id/sejarah-pramuka-di-indonesia/>).
- Ramdhani, Yogi Y. 2014. "Dari Gerakan Kependidikan ke Gerakan Pramuka: Lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia Tahun 1959–1961." *Jurnal Prodi Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Rizky, Sukiworo. 2018. "Gerakan Pramuka di Indonesia (1940–1961)." *Jurnal Pendidikan Sejarah* 5(1).
- Rousseau, Jean-Jacques. 1762. *The Social Contract*. Dalam *The Social Contract and Discourses*, diedit oleh G. D. H. Cole. London: Dent.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suhatno. 2001. *Kependidikan Bangsa Indonesia: Suatu Kajian Sejarah Tahun 1930–1961*. Yogyakarta: Masyarakat Sejarah Indonesia.
- Sunario. n.d. *Bandung: Penerbit Alumni*.
- Tajfel, Henri, and John C. Turner. 1986. *The Social Psychology of Intergroup Relations*. Oxford: Blackwell.
- Tirto.id. 2024. "Isi Permendikbud No. 12 Tahun 2024, Benarkah Pramuka Dihapus?" *Tirto.id*. Diakses 28 April 2024 (<https://tirto.id/isi-permendikbud-no-12-tahun-2024-benarkah-pramuka-dihapus-qXta>).
- Utomo, Wildan S. 2014. "Nasionalisme dan Gagasan Kebangsaan Indonesia Awal." *Lembaran Sejarah* 11(1).
- Yin, Robert K. 2016. *Case Study Research: Design and Methods*. 6th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.